

**DAMPAK POLITIK ETIS TERHADAP
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
(TAHUN 1901-1959)**



S K R I P S I

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu Agama**

Oleh :

Nama : Siti Rokhayati
NIM : 946101409
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2000

Drs. Luthfi Hamidi MAg

DOSEN STAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Siti Rokhayati

Lamp : Exempler

Kepada Yth :

Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, memeriksa, mengoreksi dan memberikan petunjuk
seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Rokhayati

NIM : 946101409

Jurusan : Tarbiyah

Judul : Dampak Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di
Indonesia.

Telah dapat diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana starata satu
agama Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara tersebut dapat segera
dipanggil dalam sidang munaqosyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Puwokerto, Pebruari 2000



Drs. Luthfi Hamidi MAg



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N)

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. & Fax. 0281 - 35624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Siti Rochayati
NIM : 946101409
Judul : DAMPAK POLITIK ETIS TERHADAP PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto pada tanggal :

23 Pebruari 2000

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata Satu Agama (S.1) guna memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Tarbiyah.

Purwokerto, 28 Pebruari 2000

Penguji,

Ketua Sidang

Drs. H. Muchjidin D
NIP. 150 110 448

Penguji I

Drs. H. Muchjidin D.
NIP. 150 110 488

Pembimbing

Drs. Lutfi Hamidi, MAg.
NIP. 150 252 267

Sekretaris

Drs. Munjin
NIP. 150 253 871

Penguji II

Drs. Asdlorii
NIP. 150 248 406

Mengetahui,
Ketua STAIN

Drs. H. Muchjidin D
NIP. 150 110 448



MOTTO

- ① اِقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
② خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
③ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
④ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
⑤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

- Artinya : 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah.
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam.
5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

(Al-Qur'an dan Terjemahan : Surat Al-Alaq Ayat 1-5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Bapak dan Ibuku
- Bapak dan Ibu Guruku
- Kakak-kakak dan adikku serta teman-temanku seiman dan seperjuangan.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى شَرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . آمَنَّا بِخُدَّ

Segala puji bagi Allah semesta alam, atas limpahan taufik dan hidayah serta inayah-Nya tersusunlah skripsi ini sebagai realisasi dari tugas-tugas yang merupakan keharusan bagi penulis dalam rangka mengakhiri studi di STAIN Purwokerto.

Di dalam penulisan ini, penulis mengakui sebenarnya tugas ini sangat berat seandainya tidak ada bantuan dari semua pihak, sehubungan dengan itu maka penulis tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat :

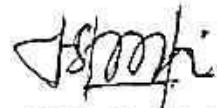
1. Bapak Drs. H. M. Muchjiddin Dimjati, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Ibu Dra. Hj. Mahmudah, selaku pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. Munjin, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Drs. Lutfi Hamidi, Mag, selaku pembimbing.
5. Bapak Drs. Asdlori, selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Bapak Drs. Muhammad Irsyad, selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Bapak Drs. Amat Nuri, selaku penasehat Akademik.
8. Para Dosen dan Karyawan, Sekolah Tinggi Agama Islam Tinggi Negeri Purwokerto.
9. Semua teman-temanku yang telah mendorong, mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis dan para pembaca.

Purwokerto, Januari 2000

Penulis



(Siti Rokhyati)

KERANGKA SKRIPSI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN SAMPUL	II
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
HALAMAN MOTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
BAB I. PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Identifikasi Masalah.....	4
C Pembatasan Dan Perumusan Masalah.....	5
D Tujuan Pembahasan	7
E Kegunaan Pembahasan	7
F Metode Penelitian	7
G Telaah Pustaka.....	9
H Sistematika Penulisan	13
BAB II. PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA.....	15
A Sebelum belanda Datang Di Indonesia.....	15
B Ketika Belanda di Indonesia.....	23
C Faktor-Faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.....	35

BAB III. ANALISA DAMPAK POLITIK ETIS : KELAHIRAN	
CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA.....	39
A. Latar belakang.....	44
B. Program dan tujuan.....	51
C. Pengaruh Politik Etis terhadap pendidikan Islam di Indonesia.....	55
 BAB IV. PENUTUP.....	 58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-saran.....	59
C. Penutup.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut data-data historis yang ada, Islam pertama kali datang di Indonesia Pada Abad ke - 7 M/ I H, dibawa oleh pedagang dan Mubaligh dari negeri Arab (Zuhairini, 1986; 133). Karena perdagangan pulalah, pada permulaan abad 16 datanglah bangsa Belanda ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang dan menyiarkan agama Nasrani. Dalam hak actroi VOC terdapat suatu pasal yang berbunyi sebagai berikut; badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang serta harus memperhatikan perbaikan Agama Kristen dengan mendirikan lembaga pendidikan. (Zuhairini, 1986; 147)

Kenyataan tersebut antara lain menjadikan pendidikan Islam sebagai dasar-dasar perkembangan dan peningkatan keberagamaan menjadi sangat terdesak, karena semua peraturan islam dinilainya merupakan rintangan paling besar bagi kemajuan. Namun perkembangan kemudian ternyata menunjukkan bahwa dalam banyak hal ajaran Islam justru mengakibatkan perubahan dan modernisasi bagi masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah Belanda berjuang untuk membatasi pengaruh Islam. (H. Aqib Suminto 1985; 24)

Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah kolonial dan menganggap agama Islam sangat membahayakan. Bagaimanapun juga Islam harus

dihadapi karena semua yang menguntungkan Islam dikepulauan ini akan merugikan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini diakui bahwa kristenisasi merupakan faktor terpenting dalam proses penjajahan dan Zending kristen merupakan rekan persekutuan bagi pemerintah kolonial, sehingga pemerintah akan membantu menghadapi setiap rintangan yang menghambat perluasan Zending (H. Aqib Suminto 1985; 26)

Kenyataan tersebut antara lain menjadikan Pendidikan Islam sebagai elemen dasar pengembangan dan peningkatan keberagaman menjadi sangat terdesak dan terpinggirkan sebab umat islam sering dinilai sebagai musuh Belanda disamping faktor kristenisasi yang merupakan faktor penting proses penjajahan, dimana zending- zending kristen sebagai teman persekutuan bagi pemerintah kolonial Belanda sehingga pemerintah akan membantu setiap rintangan yang menghambat zending. (H. Aqib Suminto, 1986; 104). Disamping itu adanya anggapan bahwa lembaga pendidikan agama Islam yang ada di pondok pesantren, masjid dan madrasah dianggap tidak membantu.

Sampai abad 20 pendidikan Islam memang masih demikian sederhana. Meskipun demikian tekanan yang dilancarkan pihak Belanda tidak tanggung-tanggung. Pada tahun 1882 Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi pengajaran agama dan pendidikan Islam di pesantren yang disebut "Pristeraden". Tahun 1905 muncul peraturan yang mengharuskan adanya perijinan yang memberikan pengajian dan pengajaran. Pada tahun 1925 pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan Islam di

Indonesia, dimana tidak semua orang diperbolehkan memberikan pengajaran dan pengajian Agama Islam. (H. Aqib Suminto 1985 ; 28)

Jika melihat peraturan pemerintah Belanda yang demikian ketat dan keras disertai dengan pengawasan dan tekanan terhadap pendidikan Islam di Indonesia, hal ini tidak lepas dari kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah Belanda, diantaranya adalah penerapan kebijaksanaan politik etis dengan semboyannya : Pendidikan, Irigasi, dan Emigrasi.

Kebijaksanaan politik etis dengan pendidikan sebagai salah satu programnya, merupakan usaha pemerintah Belanda untuk mengadakan perbaikan di bidang pendidikan dengan penerapan sistem pendidikan barat. Karena sistem pendidikan barat sangat erat kaitannya dengan kristenisasi maka politik tersebut sebenarnya dapat menghancurkan kekuatan umat Islam beserta sistem pendidikannya.

Akan tetapi penerapan kebijaksanaan politik etis, khususnya usaha dalam perbaikan di bidang pendidikan dengan penerapan sistem model barat, justru oleh umat islam dijadikan sebagai inspirasi untuk mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, dengan jalannya menirunya seperti sistem-sistem yang diberlakukan pada sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonia Belanda.

Disamping itu, penerapan kebijaksanaan politik etis ternyata tidak dapat membendung sikap pemerintahan Belanda untuk tidak mengeluarkan

peraturan baru yang bersifat pengawasan ataupun pengekan terhadap umat Islam.

Berlatar belakang dari beberapa hal yang telah penulis kemukakan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik suatu hipotesa sebagai berikut, politik etis sebagai suatu kebijaksanaan ternyata menjadi Inspirasi bagi perkembangan dan pembaharuan terhadap pendidikan Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut secara jelas kedalam bentuk skripsi dengan judul "Dampak Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia."

B. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Agama Islam datang ke Indonesia pada abad 7 M / I H yang dibawa oleh pedagang dari Arab.
2. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia membawa dampak pada keberadaan umat islam dan pendidikan Islam di Indonesia.
3. Pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren, masjid dan madrasah dianggap tidak membantu perluasan zendingnya dengan bukti adanya pemberontakan para santri.
4. Pemerintah kolonial Belanda membentuk badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam di Indonesia.

5. Dengan penerapan kebijaksanaan politik etis, dalam bidang pendidikan dengan penerapan sistem pendidikan model barat, justru oleh Umat Islam dijadikan inspirasi pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia dengan jalan menirunya seperti sistem yang telah diberlakukan dan diselenggarakan oleh sekolah-sekolah Belanda.

C. PEMBATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

1. Pembatasan Masalah

Sebelum mengadakan pembahasan, perlu kiranya penulis jelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan proposal skripsi ini, yaitu Dampak Politik Etis terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proposal ini dan sekaligus agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami masalahnya.

a. Dampak

Dampak, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal : 183).

b. Politik Etis

Politik Etis yang terkenal dengan slogan : Irigasi, Emigrasi, Pendidikan. (Mustoko 1986 : 106) artinya pene kolonial untuk membalas budi kepada negara-negara jajahan termasuk Indonesia.

Jadi yang dimaksud oleh penulis disini adalah dampak politik etis yang mendatangkan akibat terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia antara tahun 1901-1959.

c. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam yang dimaksud disini pendidikan yang berwarna Islam, pendidikan yang Islami yaitu pendidikan yang berdasarkan Islam. (Akhnad Tafsir 1992 : 24).

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang berlatar belakang keagamaan khususnya Agama Islam ini meliputi berbagai jenis dan jenjang dimana pendidikan tersebut diselenggarakan oleh masyarakat Islam sehingga mempunyai ciri-ciri yang Islami. Bentuk pendidikan seperti ini diberikan untuk menampung partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dan menghargai setiap penyelenggara pendidikan sesuai dengan kekhususan cirinya.

Dalam penulisan ini penulis membatasi penulisan mengenai pelaksanaan politik etis yang berakibat terhadap adanya perkembangan pelaksanaan pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan Islami di Indonesia setelah adanya politik etis.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas maka dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

"Bagaimanakah Dampak politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia tahun 1901- 1959."

D. TUJUAN PEMBAHASAN

1. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pendidikan Islami di Indonesia khususnya setelah di canangkannya politik etis.
2. Ingin mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan pendidikan Islami di Indonesia pada zaman Belanda setelah adanya politik etis.
3. Untuk mengetahui pengaruh tentang pendidikan Islam di Indonesia khususnya setelah dicanangkannya politik etis.

E. KEGUNAAN PEMBAHASAN

Adapun kegunaan dari pembahasan ini adalah :

1. Sebagai bahan dasar dalam mengembangkan sistem pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islami pada khususnya.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan untuk menambah khsanah ilmu pengetahuan di lingkungan kampus.

F. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini bersifat studi kepustakaan atau library reasearch, hal ini berarti penelitian dilakukan melalui penyelidikan dan pengkalian buku-buku atau literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Beritik dari judul skripsi tersebut diatas maka penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Pendekatan historis

Adalah penelitian tentang peristiwa-peristiwa pendidikan yang telah lampau, (Imam Bernadib,1994 : 131-132).

2. Pengumpula Data.

- a. Data primer, yaitu penulis kutip melalui buku-buku, majalah dan bahan-bahan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Dalam mencari sumber, penulis berusaha untuk mendapatkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang memperkuat analisa data yang sifatnya primer. Karena keterbatasan penulisan dan juga karena rentang waktu peristiwa penerapan kebijaksanaan politik etis yang sudah cukup lama maka penulis lebih banyak mengambil sumber yang bersifat sekunder yang tentunya telah mengalami kritik intern dan ekstern. Kemudian sumber-sumber tersebut di enterprestasikan yaitu mencari saling hubungan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu sehingga dapat diketahui adanya garis

penghubung antara pendidikan Islam dengan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial.

3. Analisa Data.

- a. Metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit itu tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. (Sutrisno 1990 : 42)
- b. Metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang didasarkan pada pengetahuan atau yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu kejadian khusus dinilai. (Sutrisno, 1987; 138).

G. TELAHAH PUSTAKA

Datangnya bangsa belanda ke Indonesia yang pada mulanya bertujuan untuk berdagang dan menyiarkan agama Nasrani yang akhirnya menjurus pada masalah untuk memperhatikan perbaikan agama Nasrani dengan jalan mendirikan lembaga pendidikan.

Karena hal tersebut tidak lepas dari kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah belanda, diantaranya adalah penerapan kebijaksanaan politik etis dengan semboyan : *Uigasi, Emigrasi, dan Pendidikan*. Penerapan kebijaksanaan politik etis, khususnya dalam perbaikan di bidang pendidikan dengan penerapan sistem barat, oleh Umat Islam di jadikan inspirasi, yang nantinya akan

menimbulkan dampak politik etis terhadap pelaksanaan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Sebagaimana yang penulis kutip dari skripsi yang berjudul "Dampak Politik Etis Terhadap Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia". Dimana dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan mengkaji masalah kelembagaannya. Maka penulis disini ingin mengkaji mengenai masalah pelaksanaan pendidikannya. Karena pendidikan sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul "Dampak Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia".

Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 menyatakan "masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan" ayat ini secara tidak langsung sebagai seruan untuk mempelajari agama yang dianut dimana ini merupakan tindak lanjut seruan untuk membaca dalam surat Al-Alaq. Disamping seruan tersebut ada suatu kewajiban bagi seorang muslim dimanapun ia berada wajib mengajak orang lain untuk memahami ajaran Islam.

Dari ayat tersebut tersirat adanya proses pendidikan yaitu ada yang belajar dan ada yang memberikan pelajaran. Pendidikan sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan agama Islam maka di dalam sejarahnya penyebaran agama Islam di Indonesia dikenal beberapa bentuk dan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa bentuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang memegang peranan penting pada penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu

langgar atau masjid dan pondok pesantren. (Djumhur Danasaputra 1983 : 3).
Bentuk pendidikan yang semacam ini sesuai dengan prinsip Islam yang demokratis maka pengajarannya merupakan pengajaran rakyat, yaitu masyarakat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan.

Pengajaran di langgar dan masjid bersifat permulaan, mula-mula murid mempelajari abjad arab, kemudian mengeja ayat-ayat Al-Qur'an atau kadang-kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibaca dengan diikuti irama tertentu .

Tujuan dari pendidikan di langgar dan masjid ialah dapat membaca Al-Quran sampai tamat. Masjid merupakan tempat yang paling tepat untuk mendirikan santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah dan pengajaran kitab-kitab klasik. Di manapun kaum muslimin berada, mereka selalu menggunakan masjid sebagai tempat pertemuan, pusat pendidikan Islam aktifitas administrasi dan kultural. (zamakhsyari Dhofier, 1983 ; 49).

Masjid atau langgar juga merupakan lembaga pendidikan sosial yang penting artinya, dimana masjid dapat menumbuhkan ikatan sosial, maka dengan adanya orang-orang dewasa ataupun anak-anak yang mengikuti proses pendidikan di masjid atau di langgar secara lambat laun akan tumbuh ikatan sosial yang besar yaitu suatu ikatan sosial umat islam. (Djumhur dana saputra,1983,28).
Perkembangan awal pendidikan Islam masih di pengaruhi oleh unsur mistik dan nilai-nilai pra Islam yang kuat, baru kira-kira abad XIX pendidikan Islam

Indonesia mampu melepaskan dari dari pengaruh yang bersifat mistik dan ani mistik yang bersumber pada tradisi pra Islam.

Perkembangan pendidikan Islam Indonesia mencapai bentuk yang nyata pada dasa warsa kedua dari awal abad ke 20 yaitu dengan adanya pendirian sekolah agama modern yang didasarkan atas rasionalisasi kurikulum, organisasi, serta administrasi dan sistem klasikal yang sebelumnya tidak dikenal.

Langkah pendidikan Islam Indonesia semakin surut dengan adanya sikap belanda yang berat sebelah terhadap agama. Hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang Belanda yang menyatakan netral terhadap agama. Dalam kenyataan sikap netral terhadap agama hanyalah tinggal teori, seperti ungkapan sebagai berikut :

Pernyataan netral terhadap agama ternyata berbeda antara teori dan praktek, sampai terakhir berkuasanya kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda terhadap agama lebih tepat dikatakan campur tangan daripada netral, meskipun campur tangan terhadap Islam dan kristen berbeda dalam jenis kualitas dan kuantitas, hal ini jelas terlihat dalam belbagai diktum keputusan pemerintah serta pada aneka dana yang diberikan pemerintah kolonial pada agama Islam dan Kristen yang demikian tidak seimbang. (H. Aqib Suminto tahun 1985; 27).

Bantuan pemerintah Belanda yang diberikan pada Islam dan Kristen dengan perbedaan yang menyolok ini tetap berkelanjutan sampai tahun-tahun terakhir penguasaan Belanda terhadap bumi Indonesia.

Pelbagai rintangan, tekanan dan sikap berat sebelah terhadap agama pemerintah tersebut menyebabkan pendidikan Islam Indonesia bersikap isolatif dan anti Belanda. Sikap yang demikian ini justru membawa kepada ketertinggalan pendidikan Islam dalam mengejar pendidikan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun pendidikan Kristen yang disamping memperoleh dukungan kuat dan dari luar negeri juga masih menerima banyak sekali bantuan dari pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah berniat untuk mendirikan sekolah-sekolah guna orang Indonesia, juga berniat untuk membuka pintu sekolah Belanda bagi orang Indonesia. Sejak itu banyak anak-anak Indonesia memasuki sekolah yang diadakan oleh Belanda, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak pimpinan puncak dan tokoh-tokoh terkemuka, hal ini didasarkan kepada cara bagaimana orang-orang Belanda memerintah Indonesia.

Akibatnya selanjutnya anak-anak yang telah mengenal pendidikan berat timbul kesadaran akan nasib yang menimpa bangsanya. Dari merekalah kemudian muncul tuntutan yang dialamatkan kepada pemerintah Belanda agar memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

H. SISTEMATIKA PENULISAN.

Agar skripsi ini merupakan kesatuan yang runtut, utuh sistematis, maka dalam pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab I berisikan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, metode pembahasan, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tentang pendidikan Islam di Indoensia yang meliputi; sebelum Belanda datang di Indonesia, berada ketika Belanda di Indonesia, faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pmdidikan Islam di Indonesia.

Bab III politik etis (Kelahiran Cendekiawan Muslim Indonesia) : latar belakang program, dan tujuan, pengaruh politik etis terhadap pendidikan islam di Indonesia.

Bab IV merupakan bab pentup yang memuat; kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

I. Sebelum Belanda datang di Indonesia

Sedikit sekali yang dapat kita ketahui tentang perkembangan pendidikan islam di Indoensia masa lampau, bila kita hanya bisa menduga-duga tentang pengaruhnya dalam kehidupan keagamaan masyarakat Islam Indonesia. Hal ini tidaklah mungkin dipungkiri karena pada awal mulanya Islam datang di indonesia lebih banyak merupakan kegiatan tarekat, dimana terbentuk kelompok-kelompok organisasi tarekat yang melaksanakan amalan-amalan dzikir dan wirid. (Zamakhsyari Dhofier, 1983; 34).

Corak yang demikian tidak lepas dari peran wali. Kata wali berasal dari kata Arab yang merupakan keringkasan dari kata "Waliyullah" artinya orang yang dianggap dekat dengan Tuhan, orang keramat dan mempunyai ilham yang berupa cahaya yang menyinari jiwanya. (Aboebakar, 1957; 5). Disamping amalan-amalan tarekat diajarkan juga kitab-kitab dalam berbagai cabang pengetahuan agama Islam. Dengan berbagai pengajaran ini timbul proses pendidikan islam tradisonal.

Perkembangan pendidikan Islam identik dengan perkembangan pondok pesantren dan pesantren merupakan sarana penyebaran agama yang dikelola oleh para Wali sewaktu Islam baru datang di Indonesia. Pada masa

permulaan para wali memegang pimpinan dari lembaga pendidikan Islam tradisional, maka dalam perkembangannya kedudukan wali tersebut digantikan oleh para kyai. Kemampuan mengurus dan juga pengaruh serta kepribadian Kyai merupakan yang menentukan perkembangan pendidikan Islam tradisional.

Perkembangan awal pendidikan Islam masih dipengaruhi oleh unsur mistik dan nilai-nilai pra Islam yang kuat, baru kira-kira permulaan abad XIX pendidikan Islam Indonesia mampu melepaskan diri dari pengaruh yang bersifat mistik dan animistik yang bersumber pada tradisi pra Islam. Dalam pada itu sistem pendidikan yang tradisional tetap berjalan terus dan tidak berubah masih dipertahankan, kurikulumnya bersifat sempit dalam arti bahwa kurikulum itu semata-mata terdiri atas materi pelajaran yang meliputi segi-segi kepercayaan syariah, akhlaq, tasawuf, dan ibadah dari agama Islam dan tidak ada tempat untuk materi pelajaran lain yang diberikan pada murid.

Kurikulum pendidikan diarahkan kepada pencapaian kebahagiaan hidup baik di dunia ataupun di akherat. Untuk masa yang lama pendidikan Islam Indonesia menutup diri untuk tidak memasukan materi pelajaran yang sekuler.

Dengan berkembangnya Islam yang tidak hanya di Jazirah Arab, semestinyalah tugas-tugas masjid berkembang pula, tapi perkembangan yang benar adalah apabila ia dalam proses itu tetap dalam esensi dan hakekatnya,

apabila tidak lagi dinamakan berkembang tapi pergantian dimana ini adalah suatu yang berhubungan tapi putus tanpa hubungan.

Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul, maka para pembawa ajaran Islam yang datang di Indonesia juga mengutamakan masjid (dalam bentuk yang lebih kecil disebut langgar) untuk awal mula penyebaran Islam. Ditempat inilah para penyebar agama Islam itu memberikan dan mengajarkan pelajaran-pelajaran agama Islam.

Pengajaran di langgar dan di masjid bersifat permulaan, mula-mula murid mempelajari abjad Arab, keudian mengeja ayat-ayat qur'an atau kadang-kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang yang dibaca dengan irama tertentu. (LDjumhur Danasaputra, 1976: 3).

Tujuan dari pendidikan di langgar dan di masjid ialah dapat membaca Al Qur'an sampai tamat. Pelajaran dilakukan dengan sistem individual, seorang guru akan dikelilingi oleh murid-muridnya.

Mengenai lama belajar di masjid atau di langgar ini tidak tentu. Jam belajar biasanya berlangsung pagi hari dan petang hari dan waktunya berkisar antar dua jam, pelajaran kadang-kadang dapat diselesaikan dalam beberapa bulan tetapi umumnya sekitar satu tahun.

Dalam pendidikan di langgar atau di masjid tidak dipungut bayaran, para guru agama tersebut bekerja tanpa panirih, mereka hanya menharap ridlo Allah semata, walaupun mereka mendapatkan uang hanyasebagai hadiah karena orang tua murid berterima kasih karena anaknya telah menamatkan

belajarnya, biasanya sesudah menamatkan pelajarannya diadakan selamatan dengan mengundang makan sesama murid atau kerabat dekat di langgar atau masjid.

Sampai beberapa puluh tahun lamanya pendidikan agam Islam dilakukan di langgar atau di masjid, disanalah para pemuda dan anaka-anak belajar mengkaji membaca Al-quran serta rukun dan hukum agama Islam. Sehingga jelaslah sekarang bahwa hubungan masjid atau langgar dengan pendidikan merupakan salah satu diantara sekian ciri-ciri dari pendidikan Islam, dimana dilantai-lantai masjid para guru dikelilingi oleh orang dewasa atau pun anak-anak untuk menimba ilmu padanya.

Disamping masjid pesantren juga sebagai bentuk pendidikan lanjutan setelah menamatkan pelajaran di masjid atau di langgar, di pesantren lama belajarnya tidak tentu ada yang setahun ada juga yang sampai sepuluh tahun. Banyak santri didalam mencari ilmunya itu berpindah-pindah dari pondok pesantren yang satu kepondok pesantren yang lain. Dipesantren pun para santri tidak diungut biaya untuk membyar uang sekolah dan semacamnya untuk pendidikan yang mereka terima, ahli-ahli beragama beralasan ilmu Agama tidak boleh diperjual belikan dengan uang. (Karel A. Steenbrink, 1986: 19).

Pelajaran di pesantren biasanya diberikan pada waktu pagi hari sesudah selesai sembahyang Subuh dan juga pada waktu sehabis sholat Maghrib dan sholat Isya. Pada waktu siang hari para santri kebanyakan

menghabiskan waktunya untuk membantu pekerjaan guru (Kyai) seperti bekerja di sawah, membersihkan halaman, mengerjakan kebun dan sebagainya.

Para santri kebanyakan mempelajari kitab-kitab seperti : ilmu nahwu dan shorof, fiqih, ushul fiqh, hadits, tafsir, tauhid, tasawuf dan etika, tarikh dan balaghoh. Kita-kitab tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari jilid tebal.

Untuk menanamkan rasa keimanan dan keislaman pesantren lebih bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada di tempat lain dimana sholat didirikan dengan taat seperti disana, pada siang atau malam hari dimana orang dapat mendengarkan bacaan Al Quran dengan lagu yang indah, memperbaiki bacaan dengan tajwid yang benar atau hanya untuk mengharap pahala dari membaca Al Quran tersebut, dan pada keheningan tengah malam kita jumpai pula orang mendirikan sholat. (Karel A. Steenbrink, 1986 : 16).

Sebuah pesantren dalam kehidupan sehari-harinya hampir seluruhnya diatur oleh para santri sendiri. Kyai tidak terlihat langsung dalam kehidupan para santri, Kyai hanya membaca kitab, menjadi imam dan khatib sholat Jumat, menghibur kalau ada orang sakit yang datang padanya sambil mencoba menasehati. Keterlibatan Kyai terbatas pada pengawasan yang diam. Kyai juga memberikan persetujuan terhadap santri dalam memilih lurah pondok, yang dipundaknya terpikul tanggung jawab kehidupan para santri dan ketertiban didalam lingkungan pondok pesantren.

Dalam memberikan atau menyampaikan pelajaran yang diberlakukan adanya sistim individual. Diberlakukannya sistim individual ini membawa pada sistim pengajaran yang pada garis besarnya ada dua macam yaitu :

1. Weton, cara belajar dimana pelajaran diberikan dengan duduk mengelilingi guru (kyai), ,murid-murid memegang kitab dan membuat catatan padanya sambil menyimak kitab masing-masing. Istilah weton berasal dari kata waktu (Jawa) yang berarti waktu sebab pelajaran yang diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum dan sesudah sholat fardlu. Cara belajar demikian disebut juga sebagai cara belajar “ Bandongan ”.
2. Sorongan, cara belajar dengan model make up (tatap muka) yaitu seseorang demi seseorang membawa kitab yang dipelajarinya, menghadap guru kemudian pelajaran berbahasa arab itu dibaca oleh guru (kyai) sambil diterjemahkan dan menerangkan maksudnya dan santri menyimak dan mengesahkan dengan memberi catatan pada kitabnya untuk mensaikan ilmu tersebut telah diberikan oleh gurunya (kyai). Istilah sorongan berasal dari kata sorog (Jawa) yang berarti menyodorkan kitabnya di hadapan guru atau pembantunya.

Dalam pengajaran yang demikian tidak dikenal adanya absensi, santri boleh datang, boleh tidak, sehingga bisa dikatakan bebas, bebas untuk belajar dan bebas untuk tidak belajar semuanya terserah kepada diri santri tersebut.

Disamping itu juga tidak dikenal adanya ujian, seseorang dikatakan telah menguasai apabila telah dapat memberikan ilmu yang didapat dari gurunya kepada sesama siswa yang berada di bawahnya.

Kewibawaan dan kedalaman pengetahuannya tentang ilmu agama Islam menjadikan Kyai pemimpin sekaligus mengarahkan murid-murid yang mengharap ilmunya. Kekuasaan mutlak seorang guru dapat dilihat dengan tidak adanya tanya jawab atau dialog antara murid dengan gurunya dalam memberikan pelajaran, apakah santri itu memahami kitab yang dibaca gurunya atau tidak kyai tetap melanjutkan membaca kitab tersebut.

Kekuasaan mutlak yang ada pada guru atau kyai sendiri dikarenakan adanya kedalaman ilmu yang telah diakui oleh para murid dengan melihat secara langsung dan ini terjadi karena murid tinggal bersama dengan gurunya ataupun karena adanya rasa solidaritas dan ikatan hubungan batin antara mereka.

Sistem pendidikan yang demikian merupakan penyesuaian prinsip Islam yang demokratis, meletakkan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama diantara sesama umat Islam. Pendidikan diadakan di langgar atau di

masjid atau dengan sistem asrama yang dikenal dengan pondok pesantren, pendidikan juga tanpa kelas dan tanpa jenjang yang pada akhirnya terserah pada keinginan peiajar atau tidak.

Diperkenalkannya sistem madrasah, kesempatan pendidikan untuk murid wanita, dan pengajaran pengetahuan umum dalam lingkungan pesantren merupakan jawaban positif para kyai terhadap perubahan-perubahan sebagai akibat politik Belanda di Indonesia sejak akhir abad ke-19 (Zama Khsyari Dhofier, 1983 : 38)

Diperkenalkannya madrasah membawa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, banyak madrasah yang memberikan co-education, murid laki-laki belajar bersama dengan murid perempuan, hal ini merupakan baru. Disamping itu dimasukkannya pelajaran umum di lingkungan pendidikan Islam juga merupakan perkembangan tersendiri dimana sebelumnya di kalangan pendidikan Islam hal tersebut harus dijauhi, karena takut akan faham sekuler.

2. Ketika Belanda di Indonesia

Kebesaran bangsa Turki Osmani sebagai kekuatan disebelah selatan laut Kaspi, membuat satu-persatu wilayah di Timur Tengah berhasil ditaklukkannya seperti, daerah Siria, Palestina, Mesir, dan Asia kecil. Pada tahun 1453 bangsa Turki Osmani dibawah pemerintahan Sultan Muhammad II berhasil menaklukan konstantinopel sebagai ibu kota Romawi Timur.

Dengan jatuhnya konstantinopel yang merupakan pusat peragangan maka seluruh bandar di pantai laut Tengah bagian Timur mutlak dikuasai oleh bangsa Turki, hal ini berakibat lalu lintas perdagangan antara dunia Timur dan Eropa melalui laut Tengah seluruhnya dibawah pengawasan Turki. Politik pengawasan perdagangan yang melalui laut Tengah dan mempersulit perdagangan antara dunia Timur dengan Eropa menjadikan perdagangan Eropa mundur sehingga berakibat harga rempah-rempah membumbung tinggi di pasaran Eropa, hal ini menyebabkan tidak terjangkau oleh daya beli rakyat umum. Keadaan demikian membuat bangsa Eropa memutar otak untuk menjawab politik yang diterapkan oleh bangsa Turki Osmani.

Akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16 merupakan langkah awal pelaut Eropa berhasil menjelajahi samudra. Ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajah samudra;

1. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 yang berakibat barang-barang dari Asia menghilang di pasar Eropa dan harganya mahal.
2. Adanya perkembangan dalam Ilmu Bumi yang menyatakan bahwa bentuk bumi bukan rata tetapi bulat, sehingga dunia timur juga dapat dicapai dengan berlayar terus ke arah Barat.
3. Keinginan mencari kekayaan dan daerah baru

4. Keinginan menyebarkan agama kristen kepenjuru dunia

Dapat disebut ada dua negara yang memelopori penjajahan dengan maksud mencari tanah jajahan, yaitu Portugis dan Spanyol. Disamping dua bangsa tersebut, Inggris, Italia, Perancis juga Belanda tidak ketinggalan untuk ikut menjelajah samudra. Hal ini tidak dikarenakan pada abad 15-16 berkembang politik merkantilisme yang pada akhirnya menjadi politik monopoli.

Banyak bangsa yang melakukan penjelajahan samudra menjadikan persaingan diantara mereka tidak bisa dihindarkan yang kemudian berkembang menjadi peperangan antara satu pihak dengan pihak lain. Belanda terlibat dalam satu peperangan dengan Spanyol sebagai akibat politik memonopoli.

Orang-orang Belanda yang mula-mula datang di Inonesia adalah para pedagang yang tergabung dalam "Vereenigde Oest Indische Compagnie" atau disingkat VOC, yang beragama Kristen Protestan. VOC merupakan suatu badan dagang dimana pedagang-pedagang Belanda bergabung. Timbulnya persaingan antara sesama pedagang menyebabkan pemerintahan Belanda memandang perlu adanya wadah sesama pedagang, maka dengan didukung penuh oleh pemerintahan dibentuklah suatu kongsi dagang yang di sebut VOC.

Pemerintahan Belanda memberikan hak-hak istimewa kepada VOC seperti :

1. Hak monopoli perdagangan dari ujung selatan Afrika ke sebelah timur sampai ujung selatan Amerika.
2. Hak memiliki tentara sendiri dan pengadilan sendiri.
3. Hak memiliki mata uang sendiri
4. Hak menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lain di daerah kekuasaan monopoli perdagangannya. (Hamka, 1976 : 245)

Hak-hak istimewa yang dimiliki VOC menyebabkan kongsi dagang ini berkembang dengan cepat, sehingga Belanda menjadi semakin terkenal dalam dunia perdagangan. Pada abad ke-17 Belanda memegang perdagangan Eropa.

Pada abad ke-17 banyak terjadi perlawanan terhadap pedagang Belanda oleh kerajaan Indonesia, hal ini disebabkan pihak pedagang Belanda memaksa monopoli dalam perdagangan. Kerajaan-kerajaan dagang Indonesia dari mulanya sudah terbiasa dengan perdagangan bebas.

Banten sebagai pelabuhan yang mendapat persinggahan Belanda mengadakan perlawanan dengan dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa setelah beliau naik tahta pada tahun 1651. Pada masa pemerintahannya, terjadi

perang tiga kali melawan Belanda. Dan akhirnya pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap oleh Belanda.

Perlawanan terhadap Belanda juga dilakukan oleh kerajaan-kerajaan lain di Indonesia seperti, Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Mataram juga tak ketinggalan mengadakan perlawanan. Perlawanan terhadap Belanda juga dilakukan oleh kerajaan Makasar dengan dipimpin oleh Sultan Hasanudin.

Belanda dengan susah payah menghadapi perlawanan yang dilancarkan oleh beberapa kerajaan Indonesia. Dengan menjalankan politik divide et impera atau politik adu domba sesama bangsa Indonesia. Belanda juga sering ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan beberapa kerajaan di Indonesia. Tujuan dari semua ini adalah memperlemah keberadaan kerajaan, yang kemudian menguasainya.

Tidak ketinggalan juga mengenai masalah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mengalami kesulitan pada masa pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda juga melancarkan langkah-langkah pembatasan gerak dan pengawasan yang ketat terhadap Islam. Sehingga mengakibatkan pimpinan kraton dan pimpinan pemerintahan daerah dalam abad ke-17, 18 dan 19 tidak menaruh perhatian bagi usaha peningkatan pengetahuan dan ketaatan penduduk pada Islam. (Zamakhsari Dhofier, 1982 : 12).

Akibat pembatasan tersebut perkembangan Islam menjadi tersendat-sendat. Langkah pembatasan gerak dan pengawasan yang ketat terhadap Islam merupakan tantangan nyata bagi perkembangan pendidikan Islam merupakan tantangan nyata bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Menyadari hal yang demikian, maka mulailah timbul kesadaran masyarakat Islam untuk melenyapkan pembatasan gerak dan pengawasan tersebut, yang kemudian berkembang menjadi tuntutan kemerdekaan.

Berkembangnya tuntutan kemerdekaan menjadikan seluruh rakyat Indonesia sadar, bahwa tidak hanya dengan perjuangan fisik, tetapi harus diikuti juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang memadai, yang telah mengalami perubahan-perubahan baik secara sistem ataupun bentuk pendidikan.

Usaha kearah pembaharuan pendidikan Islam dilakukan oleh berbagai masyarakat dan organisasi seperti, aliran-aliran modern Islam masyarakat Minangkabau, masyarakat Arab yang ada di Indonesia Muhammadiyah dan NU.

Tujuan pembaharuan pendidikan Islam merupakan sebagian daripada tujuan lebih luas dari Muhammadiyah yang bermaksud mengadakan beberapa perubahan berupa pembaharuan dalam bidang agama melalui jalur

pendidikan. Perubahan radikal sekolah-sekolah agama yang modern dengan didasarkan atas rasionalisasi kurikulum, organisasi serta administrasi.

Dengan sikap toleran dan pengabdian yang sungguh-sungguh pada tahun 1925 organisasi ini telah mempunyai 8 HIS, sebuah *sekhakeschool*, 14 Madrasah, dengan 119 orang guru dan 4000 murid. Sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak hanya memberikan bantuan untuk mempelajari mata pelajaran agama tetapi juga membantu untuk mempelajari mata pelajaran umum, disamping itu telah menyebarkan bacaan agama yang telah tersebar dipelosok Nusantara sekitar 7000 buku dan brosur. (Zuhairini, 1986: 176-177).

Organisasi lain yang ikut mewarnai perkembangan pendidikan Islam di Indonesia ialah Nahdatul Ulama (Kebangkitan Ulama). Keberadaan perkumpulan NU semakin berkembang dengan adanya perubahan didalam lembaga pesantren, seperti pada tahun 1910 beberapa pesantren mulai membuka diri untuk memberikan pengajaran kepada kaum wanita juga memasukan sistem madrasah pada lingkungan pesantren. (Zamakhsari Dhofier, 1982: 38).

Di luar Pulau Jawa perkembangan pendidikan juga diwarnai dengan pembaharuan, seperti di Sumatra Utara berdiri Jamiatul Wasliyah, didirikan pada tahun 1930 tepatnya tanggal 30 November. Di Sumatra Barat khususnya

di Minangkabau gerakan pembaharuan juga banyak dilakukan. Berdirinya sekolah Adabiyah, sekolah thawalib, Sumatra Thawalib merupakan sekolah benruk baru yang lebih modern. Sekolah-sekolah tersebut mengintrodusir sistem yang dipergunakan oleh sekolah yang diadakan oleh pemerintahan Belanda.

Masih banyak perkumpulan perkumpulan yang ikut mewarnai perkembangan dan mempertahankan pendidikan Islam di Indonesia jaman Belanda. Usaha yang dilakukan oleh para pembaharu dalam pendidikan bukannya tidak mendapat rintangan dari pemerintah Belanda, akan tetapi usaha tersebut tetap terus berjalan. Hambatan dan rintangan justru dijadikan motivasi untuk menyelenggarakan pendidikan islam di Indonesia.

Penyelenggara pendiddikan yang telah diperbaharui bukannya dilakukan tanpa sadar, akan tetapi sebagai suatu jawaban atas kekhawatiran yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan pendidikan barat dengan meniadakan materi pelajaran agama. Hal ini bukannya tidak mengakui akan pentingnya sekolah resmi pemerintah tersebut, apalagi manfaat yang diberikan oleh sekolah pemerintah menjamin kemajuan anak didik dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dengan melihat kenyataan di Indonesia hampir seluruhnya beragama Islam, karenanya menguasai Islam bagi Belanda berarti menguasai Indonesia.

Dengan diselenggarakannya pendidikan yang banyak tentang masalah-masalah keislaman dalam pendidikan Indologie di negara Belanda, dimaksudkan untuk mengenal lebih jauh segala seluk-beluk pribumi di Indonesia khususnya mengenai Agama Islam. (H.R. Aqib Suminto, 1986 : 2).

.Sampai akhir abad ke-19 pemerintah selalu mengambil jarak dalam menagani masalah Islam, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan yang tepat mengenai Islam. Islam sangat ditakuti, karena dianggap mirip dengan agama kristen Katolik, yang mengenal lapisan kependetaan.

Kesan bahwa pemerintah Belanda mengambil jarak dalam menangani Islam dapat dilihat dengan wujud pembatasan gerak yang berupa larangan ataupun undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Tahun 1615 Dewan kota Batavia telah mengeluarkan sejumlah peraturan pelarangan terhadap pertemuan-pertemuan terbuka ataupun pertemuan rahasia. Kemudian pada tahun 1810 Gubernur Jenderal Daendeles mengeluarkan dekrit yang memerintahkan agar para Kyai yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dilengkapi surat-surat (Zamakhsari Dhofier, 1984: 10).

Peraturan 1810 disusun denga keluarnya peraturan umum tahun 1810 yang menyatakan bahwa siapapun tidak diperbolehkan memberikan pelajaran termasuk pelajaran agama Islam, sebelum mendapat izin dari Gubernur

Jenderal. Pada tahun sama Menteri Kolonial menolak memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah Islam karena dianggap tidak menguntungkan dan kewibawaan Pemerintah Belanda.

Keluarnya peraturan umum pada tahun 1818 dirasakan oleh pemerintah Belanda dirasa sukar pelaksanaannya, oleh karena itu peraturan tersebut diperbaharui dengan peraturan baru yang dikenal dengan Ordonansi Guru atau pemburuan guru agama.

Ordonansi guru merupakan kebijakan pemerintah Belanda mengawasi pendidikan Islam, yang oleh umat Islam di Indonesia dirasakan paling berat. Peraturan iniahir dikarenakan terjadinya peristiwa Cilegon pada tahun 1888, dimana kaum petani memberontak, pemberontakan ini dinilai sebagai dimotori oleh para ha atau guru agama (H. Aqib Suminto, 1986: 52).

Menurut Ordonansi Guru tahun 1905 seorang guru agama Islam baru diperkenankan mengajar apabila sudah memperoleh izin dari Bupati. Izin tersebut baru diberikan setelah guru agama tersebut dinilai sebagai orang baik dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum. Guru agama tersebut harus mengisi daftar murid, disamping harus menjelaskan mata pelajaran yang diajarkan, Bupati atau Instalasi yang berwenang boleh memeriksa daftar tersebut sewaktu-waktu. (Deliar Noer, 1985: 194).

Seorang guru agama Islam bisa dihukum kurungan maksimum delapan hari atau denda maksimum sebesar F.25, bila ternyata mengajar tanpa izin atau lalai mengisi dan mengirimkan daftar tersebut atau enggan memperlihatkan daftar tersebut kepada yang berwenang berkeberatan memberi keterangan atau enggan diperiksa oleh yang berwenang, juga dinyatakan dalam ordonansi tersebut bahwa guru agama Islam dibatasi jumlahnya, dan jika ada murid dari luar daerah, perlu adanya kartu identitas yang harus dilampirkan. (H. Aqib Suminto, 1986 : 54).

Kepada guru agama Islam diberikan formulir berbahasa Belanda, kemudian diharuskan mengisi formulir tersebut, padahal pada umumnya huruf latin saja mereka masih buta huruf. Disamping itu juga ordonansi ini terasa membebani manakala pendidikan Islam pada waktu itu berjalan masih sangat sederhana, yaitu tidak memiliki administrasi yang memadai organisasi yang teratur, daftar murid, guru atau mata pelajaran.

Ordonansi ini lahir dikarenakan perekonomian dunia yang merosot, keadaan demikian mempengaruhi juga perekonomian Negeri Belanda, sehingga pemerintah sangat perlu mengadakan penghematan dan juga pembatasan anggaran dalam semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Disamping itu keinginan masyarakat bumi putra untuk memperoleh pendidikan barat yang semua itu berkembang tidak dapat tertampung oleh sekolah-sekolah yang diadakan pemerintah. Ketidak mampuan ini berakibat

menjamurkan sekolah swasta. Tetapi karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Belanda, dan dianggap sekolah liar. Sekolah liar ini selalu didirikan oleh orang-orang Indonesia dan dimasuki oleh anak-anak Bumi Putra. (DR. H. Agib Suminto, 1986 : 59).

Langkah pendidikan Islam Indonesia semakin tersuruk dengan adanya sikap Belanda yang berat sebelah terhadap agama. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD Belanda yang menyatakan netral terhadap agama.

Dalam kenyataan sikap netral terhadap agama hanyalah tinggal teori, seperti ungkapan berikut :

Pernyataan netral terhadap agama ternyata berbeda antara teori dan praktek, sampai terakhir berkuasanya kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda terhadap agama lebih tepat dikatakan campur tangan dari pada netral, meskipun campur tangan terhadap Islam dan Kristen berbeda dalam jenis kualitas dan kuantitas, hal ini jelas terlihat dalam pelbagai diktum keputusan pemerintah serta pada aneka dana yang diberikan pemerintah kolonial kepada agama Islam dan Kristen yang demikian tidak seimbang. (DR. H. Aqib Suminto, 1986 : 27).

Kemenangan partai agama dalam parlemen Belanda semenjak peralihan abad ke-20 sangat berpengaruh bagi kebijaksanaan pemerintah di Indonesia, apalagi semenjak kekalahan partai liberal dalam parlemen maka

golongan agama semakin kuat dan membawa pemerintahan ke prinsip Kristen. Oleh karenanya sikap netral terhadap agama seperti dinyatakan di atas sebagai teori yang tidak dapat dibuktikan kenyataannya.

Bantuan Pemerintahan Belanda yang diberikan kepada Islam dan Kristen dengan perbedaan yang menyolok ini tetap berkelanjutan sampai tahun-tahun terakhir penguasaan Belanda terhadap bumi Indonesia.

Pelbagai rintangan, tekanan dan sikap berat sebelah terhadap agama tersebut menyebabkan pendidikan Islam Indonesia bersikap isolatif dan anti Belanda. Sikap yang demikian ini justru membawa kepada ketertinggalan pendidikan Islam dalam mengejar pendidikan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun, dukungan kuat dari luar negeri juga masih menerima banyak sekali bantuan dari pemerintah kolonial Belanda.

C. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Perkembangan pendidikan Islam identik dengan perkembangan pondok pesantren dan pesantren merupakan sarana penyebaran agama yang dikelola oleh para wali sewaktu Islam baru datang di Indonesia. Pondok pesantren sebagai bentuk lembaga pendidikan Islam yang paling tua.

Kalau pada masa permulaan para wali memegang pimpinan dari lembaga pendidikan Islam tradisional, maka dalam perkembangannya

kedudukannya wali tersebut digantikan oleh para kyai. Kemampuan mengurus dan juga pengaruh serta kepribadian kyai merupakan yang menentukan perkembangan pendidikan Islam.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam menjadi pusat-pusat pendidikan Islam yang mashur pada abad 16 dengan mengajarkan berbagai kitab Islam klasik dalam bidang yurisprudensi, teologi, dan tasawuf. (Zamakhsari Dhofier, th 1983 : 34). Lembaga ibadah haji menjadi faktor yang tidak kecil artinya bagi pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Lewat ibadah haji ini orang Indonesia berkenalan dengan orang dari negeri asing, dalam kesempatan ini mereka saling bertukar pikiran tentang masalah-masalah agama, juga berkesempatan melihat bentuk-bentuk pendidikan keagamaan. Dorongan yang telah ada padanya untuk menyebarkan agama memudahkan baginya mengerti setiap keterangan dan peristiwa selama perjalanan hajinya. Pengetahuannya dan pemahamannya tidak lagi terbatas pada hal-hal disekitar tempat kediamannya semula. Kontak dengan dunia luar ini telah mempengaruhinya sehingga menjadi keinginan untuk merubah yang telah berlaku di lingkungannya.

Lamanya para kyai belajar, juga berpengaruh meningkatnya mutu keilmuan kyai, juga mutu pesantren meningkat hingga dapat mengundang santri lebih banyak lagi. Para kyai juga banyak yang mulai memperkenalkan semangat dan sistem baru dalam pendidikan. Sistem madrasah diperkenalkan.

Diperkenalkannya sistem madrasah, kesempatan pendidikan untuk wanita, dan pengajaran pengetahuan umum dalam lingkungan pesantren. Walaupun pesantren-pesantren sudah banyak yang mengadakan perubahan-perubahan yang mendasar dalam perkembangannya ini, namun perubahan tersebut masih sangat terbatas. Ada 2 alasan utama yang menyebabkannya, yaitu :

1. Para kyai masih harus mempertahankan dasar-dasar tujuan pendidikan pesantren, yaitu bahwa pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk mempertahankan dan menyebarkan Islam.
2. Mereka belum memiliki staf sesuai dengan kebutuhan pembaharuan untuk mengajarkan cabang-cabang pengetahuan umum.

Dengan berkembangnya sistem madrasah dalam lingkungan pesantren sejak saat itu, salah satu ciri penting daripada tradisi pesantren menghilang, yaitu tradisi "Santri Kelana". Diterapkannya sistem kelas yang bertingkat-tingkat dan ketergantungan kepada ijazah-ijazah formal sebagai tanda keberhasilan pendidikan seorang murid, menyebabkan seorang santri harus tinggal dalam satu pesantren saja untuk bertahun-tahun.

Banyak madrasah yang memberikan co-education, murid laki-laki belajar bersama dengan murid perempuan, hal ini merupakan perkembangan baru. Mulai saat itu Belanda memperkenalkan sistem pendidikan barat untuk

penduduk pribumi. Sekolah-sekolah tipe barat untuk penduduk pribumi ini dibuka dan dikembangkan oleh Belanda atas saran Snouk Hurgronje. (Zamakhsyari Dhoefier, 1983 : 38). Tujuannya ialah untuk memperluas pengaruh pemerintahan kolonial Belanda dan menandingi pengaruh pesantren yang luar biasa.

Karena kemajuan pendidikan dan pengajaran yang terus menunjukkan kemajuan yang pesat, hal ini di karenakan adanya faktor-faktor yang menguntungkan pertumbuhan pondok pesantren di Indonesia yaitu :

- Agama Islam telah tersebar luas di seluruh pelosok tanah air.
- Kedudukan para kyai dan ulama di lingkungan kerajaan dan keraton berada dalam posisi kunci.
- Di tanamkannya semangat anti penjajah dan mengumandangkan semboyan " cinta tanah air adalah sebagian dari iman ".
- Kebutuhan rakyat dan umat Islam akan sarana pendidikan yang mempunyai ciri khas ke-Islaman, sementara sekolah-sekolah Belanda yang hanya dapat dimasuki anak-anak dari kelas tertentu, tetapi menambah pesatnya pertumbuhan pondok pesantren, lebih-lebih setelah diperkenalkannya sistem madrasah.

- Gairah agama yang tinggi dan panggilan jiwa dari para ulama dan kyai untuk melakukan da'wah dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada seluruh lapisan masyarakat.
- Lancarnya hubungan antar Indonesia dan Mekkah, para pemuda Islam banyak yang mukim di Mekkah untuk memperdalam pengetahuan agama. (Marwan Saridjo, 1982 : 41-42).

BAB III

ANALISA DAMPAK POLITIK ETIS

(KELAHIRAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA)

A. LATAR BELAKANG

Semenjak permulaan abad 20 diseluruh permukaan bumi perkembangan dan pembaharuan, khususnya dibidang politik, ekonomi dan Idiologi. Demikian pula di Indonesia perusahaan-perusahaan Eropa mengalami perkembangan dan kemajuan yang cepat dan pesat. Perubahan-perubahan mendapat keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan Eropa tidak dirasakan oleh penduduk Indonesia, bahkan tidak merasakan adanya perbaikan sosial.

Abad 20 merupakan kebalikan daripada yang dialami penduduk pribumi Indonesia, keadaan masyarakat Indonesia pada saat itu sungguh-sungguh sedang menderita, ibarat sapi perah yang tiap hari diperah dengan hanya sedikit diberi makan. Hasil perahan tersebut dialirkan ke negeri Belanda sehingga semakin memakmurkan negeri itu.

Penderitaan masyarakat Indonesia yang demikian itu ternyata mendapat perhatian orang - orang di negeri Belanda, merekapun mendesak pemerintahannya untuk segera mengadakan perbaikan - perbaikan dinegeri

jajahan. Desakan-desakan banyak dilakukan melalui parlemen ataupun tulisan-tulisan di surat kabar atau majalah.

Disamping itu juga adanya desakan yang dilakukan oleh kaum eksportir dan Importir. Sehingga banyak mengambil keuntungan dari perdagangan dengan membeli barang-barang dagangan dari negeri jajahan dengan harga yang sangat murah, dan menjual kembali dengan harga yang sangat tinggi. Kesengsaraan dan tidak adanya kesejahteraan pada rakyat Indonesia akan mengurangi kemampuan daya beli, sehingga barang-barang yang didatangkan dari negeri Belanda tidak laku.

Baik kaum eksportir maupun importir melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda dengan menganggap pemerintah tidak peduli atas kesengsaraan rakyat negeri jajahan, sementara kemakmuran menghiasi negeri penjajah yang merupakan hasil keuntungan yang diperoleh dari negeri jajahan. Disamping itu juga gagasan untuk mensejahterakan rakyat jajahan datang dari pendeta dan bangsawan yang terdorong oleh alasan kemanusiaan dan agama.

Dalam pendidikan pemerintah jajahan berniat untuk mendirikan sekolah-sekolah guna orang Indonesia. Sejak itu banyak anak-anak Indonesia memasuki sekolah yang diadakan oleh Belanda, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak pimpinan puncak dan tokoh-tokoh terkemuka, hal ini didasarkan kepada cara bagaimana orang-orang Belanda memerintah orang-orang Indonesia. Orang belanda memerintah daerah jajahan melalui kekuasaan tidak langsung yaitu melalui tangan kaum aristokrat bumi putra.

Akibat selanjutnya anak-anak yang telah mengenal pendidikan barat timbul kesadaran akan nasib yang menimpa bangsanya. Dari merekalah kemudian muncul tuntutan yang dialamatkan kepada pemerintah Belanda agar memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Timbulnya beberapa pergerakan nasional seperti Sarikat Dagang Islam, Boedi Oetomo merupakan jalan untuk mengadakan tuntutan tersebut.

Dan akhirnya dari desakan-desakan tersebut pemerintah Belanda meloloskan permintaan untuk melaksanakan politik balas budi yaitu dengan membangun dalam bidang-bidang imigrasi, edukasi, dan irigasi. Hal tersebut tersirat dari raja Belanda pada tahun 1901, yang menyatakan antara lain :

Sebagai negara Kristen, Pemerintah Belanda di Kepulauan Hindia-Belanda lebih baik mengatur kedudukan hukum penduduk pribumi, memberikan untuk bantuan pada dasar yang tegas kepada misi kristen, serta meresapi keseluruhan tindak laku pemerintah dengan kesadaran bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap penduduk di daerah jajahan. Berhubung dengan itu, kesejahteraan rakyat Jawa yang merosot memerlukan perhatian khusus. (S.Nasution, 1987 : 15).

Gagasan pemerintah Belanda memberlakukan politik etis dapat dipandang sebagai ekspresi ide yang baru, dan dengan demikian menentang politik eksploitasi materilalistis yang selama ini diterapkan oleh pemerintah Belanda.

Aliran atau paham yang dikenal sebagai politik Etis (Etis che Politik) merupakan aliran yang timbul dikalangan orang-orang Belanda, untuk memberikan kepada penduduk asli di daerah jajahannya, bagian dari keuntungan yang diperolehnya selama menguasai Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan-perusahaan Eropa di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, berkembang dengan cepat dan meraih keuntungan yang banyak. Selanjutnya mereka juga membutuhkan pekerja-pekerja yang terdidik dan ahli. Namun secara menyeluruh bagi rakyat pada umumnya tidak dirasakan adanya perbaikan-perbaikan sosial.

Pencetus gagasan politik etis adalah Van Deventer yang dengan mottonya " Hutang Kehormatan " atau *Eeres chuld* ". (Ary H. Gunawan , tahun 1986; 19). Politik Etis ini diarahkan untuk kepentingan penduduk bumi putra dengan cara memajukan penduduk asli secepatnya melalui pendidikan secara berlatar.

Kepada orang-orang bumi putra harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan barat yang telah menjadikan Belanda bangsa yang besar, Politik baru ini menjadi terkenal langkahnya antara lain dengan slogan : "Pendidikan, Irigasi, emigrasi" atau *educate, Irigatio, Emigratie*".

Oleh karena itu dalam dua warsa sejak tahun 1900, pemerintah hindia Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah berorientasi barat. Berbeda dengan Snouck Hungronjo yang mendukung pemberian pendidikan barat kepada orang-orang golongan aristokrat bumi putra, maka Van Denventer menganjurkan

pemberian pendidikan barat kepada orang-orang golongan bawah. Van Deventer ini tidak secara tegas menyatakan bahwa orang dari golongan rakyat biasa yang harus didahulukan, tetapi menganjurkan agar rakyat biasa tidak diabaikan. Karenanya banyak didirikan sekolah-sekolah desa yang berbahasa daerah, disamping sekolah-sekolah yang berorientasi dan berbahasa pengantar bahasa Belanda.

Berkaitan dengan "arah etis" (Etische koos) yang menjadi landasan idiil dari langkah-langkah dalam pendidikan di Hindia Belanda, maka pemerintah mendasarkan kebijakannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk bumi putra, untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
- b. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumi putra disesuaikan dengan kebutuhan primer.

Atas dasar itu maka corak dan sistem pendidikan dan persekolahan di Hindia Belanda pada abad 20 dapat ditempuh melalui dua jalur. Disatu pihak melalui jalur pertama diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur dari lapisan atas tenaga terdidik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan ekonomi, di lain pihak terpenuhi kebutuhan tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan.

Secara tegas tujuan pendidikan selama periode kolonial memang tidak pernah menyatakan, tetapi dari uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa

tujuan pendidikan antara lain adalah untuk memnuhi keperluan tenaga buruh kasar untuk kepentingan kaum modal Belanda, di samping ada sebagian yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga tehnik, tenaga pertanian, dan lain-lain yang dianggap sebagai pekerja-pekerja kelas dua atau kelas tiga.

Pada umumnya gaji pegawai negeri dan para pekerja jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji orang-orang barat mengenai pekerjaan yang sama. Karena politik etis pemerintah kolonial menganggap sebagai tugas pokok dalam lapangan pendidikan, yaitu memberi pengajaran rendah kepada bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhannya. Dalam rangka memperbaiki pengajaran rendah bagi bumi putra, maka pada tahun 1907 diambil 2 tindakan penting :

1. Memberi corak dan sifat-sifat kebarat-baratan (Belanda) pada sekolah-sekolah kelas satu.
2. Mendirikan sekolah-sekolah desa.

Ternyata maksud pemerintah untuk memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia tidak tercapai, karena sekolah-sekolah bumi putra kelas dua merupakan lembaga yang mahal dan memerlukan anggaran yang besar. Politik ini menonjolkan kewajiban moral bangsa yang mempunyai kebudayaan tinggi terhadap bangsa yang tertindas.

B. PROGRAM DAN TUJUAN POLITIK ETIS

Secara garis besar politik etis mempunyai garis-garis pokok program sebagai berikut :

- a. Masalah irigasi atau pengairan.
- b. Masalah imigrasi atau transmigrasi.
- c. Masalah edukasi atau pendidikan.

Program irigasi dimaksudkan meningkatkan kesejahteraan rakyat jajahan melalui jalan melipat gandakan produksi pertanian. Produksi pertanian akan meningkat jika pengairan diperbaiki, sehingga rakyat dengan mudah mendapatkan air untuk mengairi sawah atau kebun. Kemudian imigrasi dimaksudkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program pemindahan penduduk dari pulau jawa yang sudah padat penduduknya ke kepulauan lain yang masih jarang penduduknya, Di kepulauan baru yang masih jarang penduduknya, rakyat bisa bertani atau berproduksi apa saja yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Kedua program itu akan sia-sia tanpa adanya pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan rakyat Indonesia diberi pengertian tentang kebaikan-kebaikan pengairan dan manfaatnya, serta diharapkan dengan adanya pendidikan masyarakat tersebut mempunyai sikap sadar akan kepadatan penduduk di pulau jawa dan mempunyai kemauan untuk melakukan perpindahan penduduk secara berangsur-angsur ke kepulauan lain yang masih jarang penduduknya.

Program pendidikan disini juga di maksudkan sebagai usaha memperbaiki pendidikan yang sudah ada sebelumnya, hal ini dikarenakan perbaikan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk memulai majunya negara serta perbaikan nasib rakyat di negeri jajahan. Perbaikan pendidikan berarti perbaikan generasi dari bangsa tersebut, generasi yang telah terdidik diharapkan menjadi tumbuh, berkembang dan maju sehingga dapat memperbaiki nasib dirinya dan bangsanya.

Untuk kepentingan perbaikan pendidikan pemerintah Belanda memang tidak ada cara lain kecuali mengambil pendidikan model barat yang sekuler. Pendidikan barat dimungkinkan dapat memberi kepada penduduk pribumi untuk menyaingi orang Eropa dan dapat menolong kepentingan penduduk pribumi. Penarapan model pendidikan barat sekuler memang cukup beralasan. Kondisi pendidikan di Hindia Belanda yang sedemikian rupa memungkinkan pemerintah Belanda menggantikan dengan pendidikan model barat yang sekuler. Kondisi pendidikan pribumi pada waktu itu memang cukup jelek seperti diungkapkan Van Der Chijs, inspektur pendidikan Pribumi :

Walaupun saya sangat setuju kalau sekolah pribumi diselengi dengan kebiasaan pribumi, namun saya tidak menerimanya karena kebiasaan tersebut terlalu jelek, sehingga tidak dapat dipakai dalam sekolah pribumi. (Karel A. Steenbrink, 1986: 3)

Kebiasaan jelek yang dimaksud adalah kebiasaan menggunakan metode membaca teks Arab yang hanya dihafal tanpa mengerti arti dan

maksudnya, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk titik tolak dalam mengembangkan sistem pendidikan umat.

Disamping ungkapan tersebut juga adanya penilaian oleh beberapa tokoh Belanda terhadap keadaan pendidikan di Hindia-Belanda. Sebagai pelaksana politik etis maka pemerintah Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah berorientasi barat. Dengan pendiriin sekolah-sekolah tersebut dimaksudkan pemerintah berusaha menciptakan suatu melalui sistem pendidikan yang umum lagi sekian banyak golongan penduduk yang beraneka ragam coraknya.

Akan tetapi secara umum sistem pendidikan yang di didirikan pemerintah di dasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu.

Adapun gambaran jenis sekolah setelah diberlakukannya politik etis adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Rendah

Dalam pendidikan ini menggunakan dua sistem pokok yaitu :

a. Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda

1. Sekolah Rendah Eropa (ELS)

Sekolah ini diperuntukan bagi anak-anak keturunan Eropa, Timur Asinng atau tokoh terkemuka bumi putra. Lama belajar tujuh tahun

dengan materi pelajaran membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda.

2. Sekolah Bumi Putra Kelas Satu

a. Sekolah Cina Belanda (HCS)

Materi yang diberikan sama dengan ELS, selama tujuh tahun untuk keturunan Cina.

b. Sekolah Bumi Putra Belanda (HIS)

Sekolah ini dimaksudkan untuk menampung keturunan Indonesia asli bagi golongan bangsawan dan tokoh-tokoh pimpinan. Materi pelajaran sederajat dengan ELS ditambah dengan bahasa daerah dalam tulisan Arab dan Latin.

b. Sekolah Rendah dengan Bahasa pengantar Bahasa Daerah

1. Sekolah Bumi Putra Kelas Dua

Dalam sekolah Bumi putra kelas dua bahasa Belanda dilarang diajarkan, bagi lulusan sekolah ini dilarang melanjutkan pelajaran.

2. Sekolah Desa (Volkschool)

Dimaksudkan untuk golongan kaum bumi putra yang semuanya ditanggung oleh desa, dengan lama belajar tiga tahun dengan tujuan untuk memberantas buta huruf.

3. Sekolah Lanjutan (Vervolgschool)

Dengan tujuan untuk menampung lulusan desa, lama belajar dua tahun.

- c. Sekolah Peralihan (Vervolgschool), adalah sekolah peralihan dari sekolah desa tiga tahun ke sekolah dasar dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda, lama belajar lima tahun.

2. Pendidikan Lanjutan ,

- a. MULO (Meer Uitgebreid Lager Onerwijs), dengan materi pelajaran diperluas seperti : Bahasa Belanda, sejarah, geografi ilmu alam dan menggambar, untuk orang bumi putra dan Timur Asing.

- b. Sekolah Menengah Umum (AMS)

Sekolah ini merupakan kelanjutan dari MULO. Lulusan sekolah ini dapat meneruskan ke perguruan tinggi, dengan lama belajar tiga tahun.

- c. Sekolah Warga Negara Tinggi (HBS)

Diperuntukan bagi lulusan ELS, yang menggunakan bahasa pengantar Belanda. Kurikulum HBS terdiri atas 19 mata pelajaran dengan lama belajar lima tahun.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan ini diperuntukan bagi golongan Bumi Putra. Yang terdiri dari tiga jenis pendidikan tinggi :

- a. Pendidikan kedokteran

Yang kemudian dirubah menjadi STOVIA. Sekolah ini hanya menerima lulusan MULO, sehingga lama belajarnya menjadi

tujuh tahun. Tahun 1927 berubah lagi menjadi GBS dengan lama belajar enam tahun, sedang yang terima lulusan AMS dan HBS lima tahun.

b. Pendidikan Tinggi Teknik

Sekolah ini menerima lulusan AMS dan HBS, dengan lama belajar lima tahun.

c. Pendidikan Tinggi Hukum

4. Pendidikan Kejuruan

a. Sekolah Teknik, dengan bahasa pengantar Belanda, lama belajar 3 tahun bertujuan untuk menjadi pengawas.

b. Pendidikan Dagang

Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan Eropa yang berkembang pesat.

c. Pendidikan Pertanian, yang bertujuan menghasilkan pengawas pertanian dan kehutanan dengan lama belajar 4 atau 3 tahun.

d. Pendidikan Kejuruan Wanita, dengan lama belajar tiga tahun, dengan menerima lulusan dari HIS, HCS, Schakelschool.

e. Pendidikan Keguruan

Pendidikan ini terbagi tiga yaitu :

1. Kweekschool, sekolah guru empat tahun yang menerima lulusan sekolah dasar berbahasa pengantar bahasa Belanda.

2. Hollandsch Inlandsche School, sekolah guru dengan bahasa pengantar bahasa daerah, menerima lulusan sekolah dasar (Vervolg) atau sekolah kelas dua.

f. Pendidikan Pertukangan

1. Pendidikan pertukangan yang bertujuan untuk mendidik tukang-tukang, dengan menggunakan bahasa pengantar daerah. Lama belajar dua tahun, siswa yang diterima adalah lulusan sekolah bumi putra kelas dua.
2. Sekolah Pertukangan dengan Bahasa Belanda, bertujuan untuk mendidik dan mencetak mandor, lama belajar tiga tahun.

Politik Etis merupakan pengganti politik eksploitasi materialistis yang diterapkan Pemerintah Belanda. Berbeda dengan tujuan politik eksploitasi yang hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan keadaan rakyat jajahan, maka politik etis bertujuan memberi kebahagiaan dan kemakmuran kepada bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan pendidikan, irigasi, dan imigrasi. (Djumhur Danasupatra, 1983; 134 – 135).

Tujuan politik etis untuk memberikan kesejahteraan melalui irigasi, imigrasi, reformasi pendewasaan, perwakilan dan memberikan pendidikan ternyata tidak dapat dibuktikan, seperti yang dikeluhkan oleh Van Kol bahwa, tujuan politik etis adalah eksploitasi bangsa yang terbelakang walaupun sering disembunyikan dalam kalimat-kalimat yang indah. (S. Nasution, tahun 1987; hal 19).

Perbaikan-perbaikan pendidikan yang dibarengi dengan pendirian sekolah-sekolah baru yang didorong oleh semangat politik etis misalnya, juga merupakan realisasi dari slogan dengan kalimat indah yang menyembunyikan tujuan eksploitasi masyarakat Indonesia. Pendidikan yang seharusnya membebaskan rakyat secara berangsur-angsur dari ketidakmatangan yang dipaksakan agar dapat berdiri diatas kaki sendiri, dibelokan ke tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga buruh yang dibutuhkan oleh kaum modal besar demi kelangsungannya perusahaan-perusahaannya. Tujuan pendidikan berubah menjadi tempat untuk mencetak tenaga-tenaga murah.

Pendidikan yang disediakan, juga memperlihatkan tidak adanya usaha yang sungguh-sungguh Pemerintah Belanda untuk memberikan kesejahteraan melalui pendidikan. Pendidikan Belanda bersifat dualisme yaitu adanya sekolah untuk anak Belanda dan sekolah untuk anak Bumi putra, atau sekolah untuk orang yang punya dan sekolah bagi yang tidak punya. Dualisme sistem pendidikan juga tampak dengan adanya perbedaan kurikulum, bahasa pengantar dan pembiayaan sendiri. Pendidikan yang diberikan kepada kaum pribumi hanya sebatas untuk dapat mengerti huruf, lulusan tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran. Perbedaan yang diberlakukan Pemerintah Belanda terhadap anak negeri dengan anak Belanda menjadikan tujuan pendidikan bukan untuk mobilisasi sosial tetapi untuk memepertahankan perbedaan sosial. (S. Nasution, 1987; 20). Penyelenggara pendidikan bagi kaum pribumipun hanya diperuntukan bagi golongan atas hal ini didasarkan

Perbaikan-perbaikan pendidikan yang dibarengi dengan pendirian sekolah-sekolah baru yang didorong oleh semangat politik etis misalnya, juga merupakan realisasi dari slogan dengan kalimat indah yang menyembunyikan tujuan eksploitasi masyarakat Indonesia. Pendidikan yang seharusnya membebaskan rakyat secara berangsur-angsur dari ketidakmatangan yang dipaksakan agar dapat berdiri diatas kaki sendiri, dibelokan ke tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga buruh yang dibutuhkan oleh kaum modal besar demi kelangsungannya perusahaan-perusahaannya. Tujuan pendidikan berubah menjadi tempat untuk mencetak tenaga-tenaga murah.

Pendidikan yang disediakan, juga memperlihatkan tidak adanya usaha yang sungguh-sungguh Pemerintah Belanda untuk memberikan kesejahteraan melalui pendidikan. Pendidikan Belanda bersifat dualisme yaitu adanya sekolah untuk anak Belanda dan sekolah untuk anak Bumi putra, atau sekolah untuk orang yang punya dan sekolah bagi yang tidak punya. Dualisme sistem pendidikan juga tampak dengan adanya perbedaan kurikulum, bahasa pengantar dan pembiayaan sendiri. Pendidikan yang diberikan kepada kaum pribumi hanya sebatas untuk dapat mengerti huruf, lulusan tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran. Perbedaan yang diberlakukan Pemerintah Belanda terhadap anak negeri dengan anak Belanda menjadikan tujuan pendidikan bukan untuk mobilisasi sosial tetapi untuk memepertahankan perbedaan sosial. (S. Nasution, 1987; 20). Penyelenggara pendidikan bagi kaum pribumipun hanya diperuntukan bagi golongan atas hal ini didasarkan

pada harapan agar kaum atas yang sebagai pemimpin dikalangan kaum pribumi menjadi pewaris dari kebudayaan barat, sehingga kalau kaum golongan atas telah menjalankan pola kehidupan sosial budaya barat maka rakyat biasa tentunya akan mengikuti jejak langkah pemimpin.

C. PENGARUH POLITIK ETIS TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Pendidikan sebagai salah satu program politik etis berhasil mencapai kelengkapan, kemajuan, dan berperan aktif dalam menentukan arah perkembangan politik, semenjak di jalankannya politik etis oleh pemerintah Belanda. Politik etis bagi pendidikan pada umumnya mempunyai nilai tersendiri, penyelenggaraan beberapa jenis pendidikan oleh pemerintahan Belanda merupakan realisasi adanya perhatian untuk mensejahterakan rakyat melalui pendidikan, walaupun penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah masih kelihatan tidak sungguh-sungguh, sehingga pendidikannya masih bersifat dualisme, gradualisme dan konkordansi. (S. Nasution, 1987; 20).

Politik etis membawa akibat terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Langkah pembatasan gerak dan pengawasan yang ketat terhadap Islam merupakan tantangan nyata bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Menyadari hal yang demikian maka mulailah timbul kesadaran masyarakat Islam untuk melenyapkan pembatasan gerak dan pengawasan tersebut, yang kemudian berkembang menjadi tuntutan kemerdekaan, berkembangnya tuntutan

kemerdekaan, berkembangnya tuntutan kemerdekaan menjadikan seluruh rakyat Indonesia sadar, bahwa untuk memperoleh kemerdekaan dari tangan Belanda tidak hanya perjuangan fisik, tetapi harus diikuti juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang memadai, yang telah mengalami perubahan-perubahan baik sistem ataupun bentuk pendidikan.

Politik etis dengan programnya masalah pendidikan yang memperkenalkan sistem pendidikan barat, dimana tadinya untuk menghancurkan pendidikan Islam di Indonesia, ternyata malah menjadi inspirasi bagi kaum pembaharu pendidikan untuk menirunya sebagai langkah pembaharuan di lingkungan pendidikan Islam.

Usaha pembaharuan pendidikan Islam dilakukan oleh para tokoh terkemuka, ulama, kyai. Seperti Dr. Wahidin Sudoro Husodo dengan mendirikan suatu perkumpulan dengan nama Boedi Utomo, KH. Akhmad Dahlan sebagai pelopor gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah, Sayid Muhammad Al Fachsir Ibnu Abdurrahman Al Masjihur mendirika perkumpulan jamiat khair.

Perubahan radikal yang diadakan oleh pembaharu Muhammadiyah ialah mendirikan sekolah-sekolah yang didasarkan atas rasionalisasi kurikulum organisasi serta administrasi. Disamping itu juga memberikan mempelajari mata pelajaran umum. Perkumpulan jamiat khair memperhatikan dua bidang kegiatan pertama pendirian dan satu sekolah pada tingkat dasar, yang kedua pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pelajaran. (Deliar Noer, tahun 1985; 68 - 69).

Disamping materi pelajaran keagamaan diajarkan pula pelajaran-pelajaran modern seperti berhitung, sejarah, ilmu bumi.

Perkumpulan ini merupakan organisasi yang kecil akan tetapi mempunyai makna sebagai pembawa perubahan pendidikan Islam di Indonesia yang tadinya tetap pada sistem tradisi yang tidak berkelas dan tidak memasukan materi pelajaran umum kecuali materi keagamaan.

Penyelenggaraan pendidikan yang telah diperbaharui bukannya dilakukan tanpa sadar, akan tetapi sebagai suatu jawaban atas kekhawatiran yang ditimbulkan oleh penyelenggara pendidikan barat dengan meniadakan materi pelajaran agama hal ini bukannya tidak mengetahui akan pentingnya sekolah resmi pemerintah tersebut, apalagi manfaat yang diberikan oleh sekolah pemerintah menjalin kemajuan anak didik dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Disamping itu adanya kekurangan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, menjadikan tokoh-tokoh tersebut bergerak dalam bidang pendidikan. Pembaharuan yang dilakukan oleh para tokoh perkumpulan sedikit banyak diilhami oleh perkenalan para tokoh tersebut dengan pendidikan barat yang dilihatnya dinegeris sesama muslim.

Usaha untuk mengadakan perbaikan pendidikan Islam dengan meniru model pendidikan Barat akhirnya diikuti oleh perkumpulan-perkumpulan lain yang menyelenggarakan pendidikan. Sehingga bermunculan Islam yang mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai tinggi. Hal tersebut menggoncangkan

persediaan pemerintah Belanda, sehingga mengambil langkah untuk pembatasan gerak dan pengawasan bagi perkembangan pendidikan Islam Indonesia.

Dijalannya politik etis yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pendidikan tidak sanggup meniadakan lahirnya peraturan pemerintah yang dikenal dengan "Pemburuan" guru agama pada tahun 1905. Peraturan ini merupakan salah satu upaya pemerintah belanda untuk mengadakan pengawasan terhadap pendidikan Islam di Hindia-Belanda yang sedang mengalami perkembangan pesat.

Menjadi lengkaplah usaha pemerintah belanda untuk menghentikan gerak laju pendidikan Islam. Pelbagai rintangan dan peraturan diciptakan oleh pemerintah tanpa bisa dihentikan oleh kebijaksanaan yang baru saja digembargemborkan oleh pemerintah Belanda, yang kalau didengar, gaungnya masih melekat ditelinga akan tetapi gaung tersebut tetap tidak mampu untuk menghentikan gerak luncur peraturan yang justru lahir setelah pemerintah mencanangkan politik etis.

Penyelenggaraan dan pembaharuan dalam pendidikan dianggap penting oleh karena diakui dengan pendidikan yang telah mengalami perubahan, besar artinya bagi pembinaan dan pembangunan generasi Islam di Indonesia. Sehingga muncul generasi baru orang terdidik orang muslim yang terkenal dengan cendekiawan / tokoh-tokoh terdidik Islam. Cendekiawan berarti : kaum cerdas, pandai terpelajar kaum intelek, (W. g. s. Poerwadarminto; 197). Intelektual muslim adalah golongan muslim yang berpendidikan yang memiliki

kelebihan istimewa yang menyangkut nilai budaya dan yang, karenanya, dapat dijadikan pemimpin (Ziauddin Sardan, 1986; 88). Sedangkan kyai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya (Zamakhsyari Dhofier, 1982; 55)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya segalanya baik itu kekayaan maupun kepandaiannya. Dilihat dari kekayaannya saja adanya hasil bumi yang melimpah yang mengakibatkan / menjadikan bangsa-bangsa Eropa khususnya Belanda tertarik ingin merebut, menguasai bahkan menjajah Indonesia untuk kemakmuran, keuntungan, kebahagiaan, negerinya sendiri yaitu pemerintahan Belanda.

Sedangkan dilihat dari pendidikannya bangsa Indonesia adalah bangsa yang dianggap sebagai benteng pendidikan Islam. Karena nantinya sebagai pemberontak pemerintah Belanda. Oleh karena itu Belanda ingin masuk kedalam pendidikan Islam dengan tujuan ingin menghancurkan umat Islam serta menyebarkan agam Kristen.

Bangsa Indonesia yang merasa pendidikannya mulai dimasuki unsur barat sadar akan hal tersebut, mulai timbul keberanian untuk menyerah, mengambil, yang positif guna kemajuan pendidikannya tanpa meninggalkan keIslamannya.

Akibat dari Politik Etis yang diterapkan oleh pemerintah Belanda tersebut membawa dampak yang negatif tetapi walaupun demikian ada juga dampak positif yaitu menjadikan timbulnya inspirasi para cendekiawan muslim,

pembaharu pendidikan Islam di Indonesia dengan munculnya gerakan-gerakan, organisasi-organisasi Islam dalam melawan penjajah.

B. Saran-saran

Dengan adanya pendidikan dimasa dulu yang kita ketahui lewat penelitian sejarah maka kami memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah khususnya Departemen Pendidikan :

- Hendaknya para pelaksana pendidikan menyadari betul akan kemampuan sumber daya manusia yang ada di Indonesia agar tidak diremehkan bangsa lain.
- Para guru / pendidik harus benar-benar mengerti dengan perkembangan zaman / perubahan-Perubahan yang sedang dialami. Misalnya : Masuknya budaya barat harus benar-benar diselektif jangan sampai menimbulkan segi negatif tapi diambil dari segi positif tanpa harus meninggalkan unsur pribadi bangsanya apalagi agamanya.
- Hendaknya memberikan pelajaran-pelajaran dimasa yang dulu untuk dijadikan sebagai wawasan yang luas, pandangan untuk lebih maju kependidikan Islam yang lebih modern, jangan terlalu otoriter, sehingga nantinya si anak didik tersebut dalam pendidikan Islam dapat memenuhi tantangan zaman tanpa mengesampingkan tujuan ukhrowiyah sehingga benar-benar tercipta manusia yang sempurna dunia akhirat

C. Penutup

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini, penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini, walaupun penulis merasa belum puas, karena dirasa isinya masih jauh dari sempurna. Namun demikian sudah diusahakan sepenuh tenaga dan pikiran sejauh yang dituntut.

Akhir kata, tak lupa diharapkan tegur sapa serta kritik-kritik membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita khususnya mahasiswa yang menekuni Ilmu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

ARY H. GUNAWAN

1986. Kebijakan – kebijakan Pendidikan di Indonesia; Bina aksara
Jakarta

ABU AKHMADI

1975. Sejarah Pendidikan; CV Tolha Putra Semarang

AKHMAD TAFSIR

1992. Ilmu Pendidikan dalam perspektif Islam; PT Remaja Rosda

DELIAR NOER

1985. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990 – 1942; Lp3ES

DJUMHUR DANA SAPUTRA

1983. Sejarah Pendidikan; CV Ilmu Bandung

DEPARTMENT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia : Penerbit; Balai Pustaka Jakarta

DEPARTEMENT AGAMA RI

1993. Surat Keputusan Rektor

HAMKA

1976. Sejarah Umat Islam IV; Bulan Bintang

H. AQIB SUMINTO

1986. Politik Islam Hindia Belanda; LP3ES

IMAM BARNADIB

1994. Pendidikan Perbandingan Buku 1 Dasar-dasar; Andi Offset
Yogyakarta

KAREL A. STEENBRINK

1986. Pesantren Madrasah Sekolah; LP3ES

M. NOER MATDAWAN

1977. Sejarah Ringkas Pendidikan Islam dan Proses masuknya Di Indonesia; Kota Kembang Yogyakarta

POERWADARMENTO

1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta

S. NASUTION

1987. Sejarah Pendidikan Indonesia

SUTRISNO HADI

1990. Metodologi Research, Yogyakarta

MARWAN SARIDJO

1982. Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia, Penerbit Darma Bhakti

ZUHAIRINI

1986. Sejarah Pendidikan Islam. Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan

/ IAIN, Direktorat Jendral Pembinaan Pelembagaan Agama Islam : Jakarta

ZAMAKHSYARI DHOFIER

1982. Tradisi Pesantren : LP3ES

ZIAUDDIN SARDAN

1986. Rekayasa Masa Depan Peradaban muslim, Penerbit Misan

Nomor : ...176...../45

Piagam

Pimpinan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI " SUNAN KALIJAGA " dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SITI ROKHAYATI
Tempat / Tanggal lahir : Purbalingga, 13 - 3 - 1975
Nomor Peserta Penataran : 12.045.0179/1994
Fakultas Jurusan : Tarbiyah / PAI
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Alun-alun selatan No.2 Purbalingga

telah mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Pola 45 Jam Terpadu bagi Mahasiswa Baru INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI " SUNAN KALIJAGA " FAKULTAS TARBİYAH PURWOKERTO Tahun Akademik 1994-1995 yang diselenggarakan oleh INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI "SUNAN KALIJAGA" FAKULTAS TARBİYAH PURWOKERTO di bawah pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian BP-7 Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1994 dan Keputusan Kepala BP-7 Pusat Nomor KEP-80/BP-7/VII/1994, dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Agustus 1994 dengan hasil baik.

Pemegang Piagam ini berhak untuk mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila.

Yogyakarta, 27 Agustus 1994

REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"SUNAN KALIJAGA"



DR. H. SIMUH

NIP : 150 037 939



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26 / KP / PP. 009 / 1/99

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 74 Tahun 1998, tanggal 16 Oktober 1998. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : SITI ROKHAYATI
Nomor Induk Mhs : 946101409
Jurusan : TARBIYAH / PAI

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

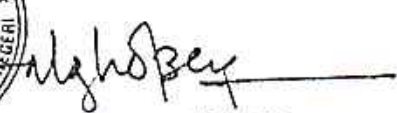
Desa : PURWODADI
Kecamatan : TAMBAK
Kabupaten : Banyumas, Jawa - Tengah

selama 2 bulan, dari tanggal 24 Oktober sampai 19 Desember 1998, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : A (Baik Sekali)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 2 JANUARI 1999
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
STAIN PURWOKERTO



Kepala


Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag.

NIP. : 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 1 Juni 1999

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di :

P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Siti Rokhayati
2. Nomor Induk : 946101409
3. Semester/Jurusan : X/ TARBIYAH
4. Angkatan Tahun : 1994
5. Tahun Akademik : 1998-1999

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : DAMPAK POLITIK ETIS TERHADAP PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

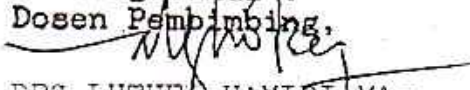
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
DRS. LUTHFI HAMIDI, MAG

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

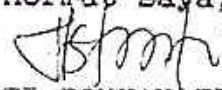
Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing.


DRS. LUTHFI HAMIDI, MAG

NIP. : 150 252 263

Hormat saya,


SITI ROKHAYATI

N I M. 946101409

MENYETUJUI :
KETUA JURUSSAN


DRS. MUMLIM

NIP. : 150 253 821

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.: 40 A Telepon 35624 Purwokerto

REKOMENDASI
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

1. Nama : Siti Rokhayati
2. Nomor Induk : 946101409
3. Semester/Jurusan : X / TARBIYAH
4. Angkatan Tahun : 1994-1995
5. Tahun Akademik : 1998-1999
6. Judul Rencana Skripsi : DAMPAK POLITIK ETIS BERHADAP PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

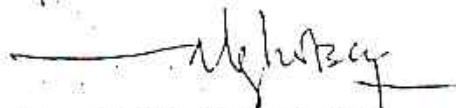
Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal :

PEMBIMBING :

MENGETAHUI :
KETUA JURUSAN PAI/PBA,


Drs. Mantun
N I P . : 150 253 821


Drs. Lutfi Hamidi, M.Pd.
N I P . : 150 252 268

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Rokhayati
Tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 13 Maret 1975
Alamat : Karangreja RT 07/04
Kec. Kutosari, Kab. Purbalingga
Status : Belum Kawin
Pendidikan : - SD Negeri Karangreja 2, lulus th 1987
- SMP Negeri Kutosari, lulus th 1990
- SMA Muhamadiyah I Purbalingga, lulus th 1993
- STAIN Purwokerto, lulus th 1999

Nama Orang tua ,

Ayah : Atmo Sukirno

Ibu : Nasriyati (Alm)

Pekerjaan Orang tua ,

Ayah : Guru

Ibu : -

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenarnya dan berani angkat sumpah jika perlu.

Purwokerto, Desember 1999

Penulis,



(Siti Rokhayati)
NIM: 1746101409